

**Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai BBM**

**( Studi Pada Dinas Sosial Kota Batu )**

**SKRIPSI**

**Merupakan Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana**

**Administrasi Publik**



**Oleh :**

**FELISITAS ANGGELINA JEHAUT**

**2019210094**

**KOMPETENSI KEBIJAKAN PUBLIK  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi  
MALANG  
2024**

## RINGKASAN

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) belakangan ini mulai menimbulkan keraguan di benak masyarakat. Menurut Achmad Nur Hidayat, pakar kebijakan publik di Narasi Institute, mengubah pendekatan penghapusan harga BBM bersubsidi akan menjadi tantangan besar bagi kehidupan masyarakat sehari-hari. Karena penetapan waktu kenaikan harga bensin akan berdampak pada harga pangan dan kebutuhan masyarakat lainnya, menurutnya hal tersebut tidak tepat. Selain itu, ia sampai pada kesimpulan bahwa dampak terbesar dari semua kenaikan harga ini adalah stagnasi inflasi, yang merupakan risiko yang ditimbulkan oleh kenaikan harga bahan bakar. Menentukan operasionalisasi program bantuan langsung tunai BBM yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Batu menjadi tujuan penelitian ini. Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian kualitatif digunakan. Tiga pendekatan digunakan untuk memperoleh data: dokumentasi, wawancara, dan observasi. Purposive sampling digunakan untuk memilih lima partisipan untuk dijadikan informan penelitian.

Implementasi Program Bansos BBM Dinas Sosial Kota Batu menjadi subyek dari empat hasil penelitian utama. Pertama-tama, ada tiga jenis komunikasi. Mulanya transmisi dan difusi komunikasi, sejalan dengan hasil observasi para sarjana yang mempelajari komunikasi masyarakat yang dilakukan oleh petugas Dinas Sosial. Informasi peraturan terkini disajikan dengan sangat baik. Selain itu, sumber daya Dinas Sosial juga telah menyiapkan infrastruktur dan fasilitas yang diperlukan untuk penyediaan bahan bakar tunai langsung secara menyeluruh. Ketiga, hasil penelitian ini menunjukkan kebermanfaatan disposisi atau sikap pelaksana dalam program bantuan pembayaran BBM langsung Dinsos. Struktur Organisasi merupakan poin keempat. Kajian tersebut digunakan untuk memperkuat kerangka birokrasi pelayanan sosial yang dibuat dan dilaksanakan sesuai dengan kewajiban masing-masing sektor.

**Kata Kunci:** *Implementasi , Manfaat ,Masyarakat Bantuan Langsung Tunai BBM*

## 1. BAB I

### 2. PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) belakangan ini menjadi perbincangan publik. Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi menaikkan harga BBM sebesar 25 hingga 30 persen. Seperti diketahui, harga pertalite kini Rp 10.000 per liter, bukan Rp 7.650. Kemudian, harga BBM bersubsidi naik menjadi Rp6.800 dari Rp5.150. Kenaikan harga pertama dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500. Presiden Jokowi sepertinya bukan presiden pertama yang menaikkan harga BBM. Sejak masa Orde Lama, khususnya pada masa pemerintahan Presiden Sukarno, harga BBM mengalami kenaikan.

Hanya B.J. Habibie yang menjaga agar harga BBM tidak naik sejak berakhirnya Orde Lama di kalangan presiden. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) biasanya akan meningkat jika pemerintah memilih untuk tidak mengubah harga BBM. Sebab, perubahan harga bahan bakar akan menaikkan harga bahan bakar. Pada tanggal 22 November 1965, harga bensin premium naik menjadi Rp 0,3 dan solar menjadi Rp 0,2 yang merupakan kenaikan harga bahan bakar pertama. Tiga bulan kemudian, tepatnya pada 3 Januari 1966, harga bensin premium naik menjadi Rp1,00 dan solar menjadi Rp0,80. Per 27 Januari 1966, bensin premium dihargai Rp 0,5 dan solar Rp 0,4.

Achmad Nur Hidayat, pakar kebijakan publik di Narasi Institute, menyatakan bahwa perubahan harga bahan bakar bersubsidi akan sangat merugikan kehidupan masyarakat. Ia mencatat, waktu kenaikan harga bahan bakar tidak

tepat karena akan berdampak pada harga pangan dan kebutuhan masyarakat lainnya. Ringkasnya, dampak dari banyak kenaikan harga akan sangat besar, dan kenaikan harga bahan bakar berisiko menghentikan inflasi. Kemungkinan gelombang PHK yang meluas sangat mengkhawatirkan Ahamd. Aspek sosial masyarakat juga terkena dampaknya; misalnya, kenaikan harga bahan bakar berkontribusi terhadap meningkatnya angka kemiskinan. Hal ini menjelaskan mengapa bensin merupakan bagian penting dari tugas operasional. Karena kenaikan harga bahan bakar akan meningkatkan pengeluaran, maka efisiensi produksi harus diperhatikan. Oleh karena itu, hingga kontrak kerja pekerja baru berakhir, dunia usaha harus berhenti memata-matai mereka (PKH). Hal ini mungkin akan menyebabkan peningkatan angka kemiskinan.

Pemerintah mengklaim bahwa opini masyarakat terhadap pemerintah akan terpengaruh oleh kenaikan harga bahan bakar yang menyebabkan ketidakbahagiaan. Terutama karena pihak oposisi bermaksud mengeksploitasi kenaikan harga bahan bakar sebagai alat untuk meningkatkan kedudukan pemerintah menjelang pemilu. Selain itu, pemerintah juga harus memahami dampak kenaikan harga bensin. Kekhawatiran masyarakat terhadap kenaikan harga bensin harus disikapi oleh pemerintah. Pemerintah harus meyakinkan masyarakat bahwa membayar subsidi gas adalah hal biasa untuk membantu kelompok yang terkena dampak, khususnya rumah tangga kelas menengah ke bawah.

Reaksi masyarakat terhadap kenaikan harga BBM akan dicermati Kementerian Keuangan. Pemerintah memberikan dukungan melalui sejumlah program bantuan sosial tambahan, seperti skema subsidi, untuk memastikan bahwa masyarakat tidak terkena dampak buruk dari kenaikan harga bahan bakar. Selain

itu, pemerintah terus menyatakan optimismenya atas belum adanya kemajuan dalam perekonomian Indonesia. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, anggaran perluasan subsidi BBM dan penghematan BLT sebesar Rp 24,17 triliun yang terbagi dalam dua kategori. 14,6 juta pekerja akan mendapat bantuan subsidi gaji (BSU) sebesar Rp600.000 jika gajinya kurang dari Rp3,5 juta. Kedua, BLT BBM yang diberikan sebesar Rp150.000 per bulan dengan durasi empat bulan, akan diberikan kepada 20,65 keluarga penerima. BBM atau bahan bakar minyak tunai digunakan sebagai salah satu bentuk bantuan sosial. Tindakan ini merupakan pemberitahuan atas keputusan pemerintah sebelumnya yang menaikkan harga BBM. Penerima BLT BBM tidak diperbolehkan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan harus dalam keadaan miskin atau terancam menjadi ASN.

Di wilayah Kota Batu, penyaluran bantuan sosial yakni bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar sudah dimulai. dari Jawa Timur pada Kamis, 8 September 2022. Menanggapi kenaikan harga bahan bakar, pemerintah pusat memberikan bantuan ini. Total bantuan sosial yang diterima adalah 8.744 KK, berdasarkan Statistik Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dinas Kota Batu. Pada hari awal penyaluran, BMM disalurkan dengan mendatangi rumah penerima manfaat. Adiek Iman Santoso, Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso dan Sekretaris Dinas Sosial Kota Batu, turut mendampingi pembagian barang simbolis di tiga desa atau kelurahan. khususnya permukiman Ngaglik, Mojorejo, dan Tulungrejo.

Sekretaris Dinas Sosial Kota Batu Adiek Imam Santoso mengatakan, delapan dari dua puluh empat kelurahan di kota tersebut mengalami keterlambatan. Hal ini digunakan untuk memastikan BLT BBM terdistribusi ke beberapa daerah. Delapan

permukiman tersebut diantaranya adalah Desa Ngaglik, Desa Beji, Desa Sisir, Desa Mojorejo, Desa Pendem, Desa Junrejo, Desa Dadaprejo, dan Desa Oro – Oro Ombo.

Menurut nama samaran Dedek yang mendapat temuan koordinasi tersebut, bantuan tidak bisa diberikan selama sistem pendataan masih berjalan. karena proyeksi ketidaksesuaian SOP. Kami khawatir akan terjadi ketimpangan dan ketimpangan nilai tukar rupiah jika penyaluran BLT BBM dilakukan dalam keadaan sistem sedang diperbaiki. Penjadwalan ulang akan dilakukan dengan cara itu, menurut Dedek.

Pemeliharaan sistem aplikasi giro tunai pos (PGC) menjadi permasalahan dalam penelitian ini karena menyebabkan BLT tidak dapat didistribusikan secara merata ke tujuh lokasi tersebut. Jadilah pembayar di Kantor Pos. Selain itu, pergeseran Nomor Kantor Pos Kota Batu dari 65300 menjadi 65311 menjadi faktor lainnya.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang informasi di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

Bagaimanakah Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai BBM Di Kota Batu ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan konteks di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk Mengetahui Bagaimana implementasi program Bantuan Langsung Tunai BBM Di Dinas Sosial Kota Batu

## **1.4 Manfaat**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penulis diharapkan dapat memberikan pencerahan kepada pembaca mengenai gagasan-gagasan yang dikemukakannya, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan publik yang dapat segera diimplementasikan dalam bidang politik.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Sehubungan dengan pelaksanaan Program BLT BBM di Kota Batu khususnya pada Program Studi Administrasi Publik, diharapkan kajian ini mampu memberikan pemahaman dan informasi yang lebih kepada pembaca.
- b. Sebagai penilaian bagi Pemerintah Desa dan Dinas Sosial terhadap pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai. menggantikan lembaga yang disetujui untuk menyalurkan Bantuan Langsung Tunai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo, 2012. Dasar-dasar kebijakan public. Bandung ; Alfabeta
- Anggara, Sahya. 2014. Kebijakan public Bandung : CV. Pustaka Setia
- Awan & Yudi. 2016. Teori dan analisis kebijakan public. Bandung ; Alfabeta
- Badjuri dan Teguh. 2002. Kebijakan Publik Konsep dan Strategi. Universitas Diponegoro Semarang.
- Edwar III, G.C (1980). Implementing public policy ( C.Q. Press (ed.))
- Edward. 2005. Hukum Publik. Jakarta: PT Grafindo Persada
- Winarmo. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Penerbit Media Pressindo.
- Hafis, Muhammad. (2022). Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Propinsi Riau. Diss. ( Doctoral dissertation Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- Novianto, E. 2008. Persepsi Masyarakat Tentang Subsidi Langsung Tunai ( Studi Kasus Penanggulangan Kemiskinan Di kel. Bukit Biru kec. Tenggarong). Jurnal Jemi, vol 8, No.2:4-3-57.
- Nur Fitra Tsania. (2022). Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Bagi Masyarakat Miskin Di Desa Laringgi Kabupaten Soppeng.
- Salim, Samroni. dkk K. Kebijakan Subsidi BBM dan Pembangunan Energi Berkelanjutan. Jakarta: The Habibie Center Building.
- Selviana. 2016. Bantuan Langsung Tunai. Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi, vol3, No,2:126-135.
- Setywan, dody. 2017. pengantar kebijakan public. Malang : Intelgensia Media
- Sugiyono. (2017). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta, CV.
- Wandi, Elpis. Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.
- Burhanuddin, B. ( 2021). Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT ) Di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tono Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020 ( Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Mataram).
- Cahyaningsih, Devy Nur. (2022). Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai ( BLT) Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak Covid 19..
- Ibrahim M. Bagus, (2022). [https://www.detik.com/jatim/berita/penyaluran\\_blt\\_bbm\\_di\\_8\\_desa\\_kota\\_batu\\_di\\_tunda](https://www.detik.com/jatim/berita/penyaluran_blt_bbm_di_8_desa_kota_batu_di_tunda) /amp



<https://www.kompasiana.com/amp/vaizulaz> dampak dari kenaikan harga bbm bagi masyarakat Indonesia.